

PELAKSANAAN BOS DAN MINAT MASYARAKAT MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Ujang Didi Supriyadi

Universitas Subang, Jl. P.H. Hasan Musthofa, No. 38 Bandung
E-mail: adang_wijaya@yahoo.com

Abstract: Analyzing the Implementation of *Bantuan Operasional Sekolah* or School Operational Fund and the Public's Interests in Free Basic Education. The Government of the Republic of Indonesia has recently issued an educational policy, the so-called *Bantuan Operasional Sekolah* known as BOS or School Operational Fund. This article presents the results of a descriptive study on the implementation of the School Operational Fund in the regency of Gunung Mas, Central Kalimantan. The data were obtained through survey on the spot, document analysis, and interviews. The results show that School Operational Fund has increased the interest of the public to send their children to primary schools. This has been indicated by the results of the interviews with a number of school principals and students' parents (guardians) in the area. However, the interest to send children to primary schools was more significant than that to junior high schools.

Abstrak: Pelaksanaan Bos dan Minat Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar Gratis. Kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah mendorong minat masyarakat untuk berperan aktif mengikuti pendidikan dari jenjang SD hingga SMP. Hal ini sesuai hasil wawancara kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh wilayah Indonesia. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SD dirasakan lebih besar, sedangkan pada jenjang SMP peningkatan dirasakan kurang signifikan dan tidak merata.

Kata kunci: BOS, minat masyarakat, pendidikan dasar

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Indikator kualitas SDM Indonesia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Merujuk data ESCAP Population Data Sheet tahun 2006 sebanyak 35,29% rakyat Indonesia tidak tamat sekolah dasar, 34,22% tamat SD, dan hanya 13% yang tamat SLTP. Keadaan ini menempatkan IPM Indonesia pada urutan ketujuh dari sebelas negara Asia Tenggara. Vietnam yang baru terbebas dari pergolakan di dalam negeri, IPM-nya peringkat kelima di Asean. Rendahnya tingkat kesehatan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu sebesar 307 dari 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan negara tetangga Singapura hanya sebesar 25 per 100.000 KH.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dilakukan dengan, kebijakan pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan, guru, dan menyediakan dana operasional pendidikan secara lebih memadai. Kenyataan tersebut memberi gambaran umum, bahwa pendekatan *input-output* secara makro belum menjamin peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Pendekatan *input-output* yang bersifat makro tersebut kurang memperhatikan aspek yang bersifat mikro, yaitu proses yang terjadi di sekolah. Dengan kata lain, dalam membangun pendidikan selain memakai pendekatan makro juga perlu memperhatikan pendekatan mikro, yaitu dengan lebih berfokus pada institusi sekolah yang berkenaan dengan kondisi keseluruhan sekolah, seperti iklim sekolah dan individu-individu yang terlibat di sekolah terutama tentang profesionalitas pendidik yang ada di sekolah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Juli 2005 merupakan perhatian pemerintah kepada pendidikan. Program BOS bertujuan untuk meringan-

kan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin. Program ini lebih diorientasikan kepada peningkatan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan pendanaan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Mulai tahun 2009, pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS. Program ini ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, dari Rp 117.500 untuk SD dan Rp 162.250 untuk SMP di tahun 2005, kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi Rp 400.000 untuk SD di kota, Rp 397.000 untuk SD di kabupaten, Rp 575.000 untuk SMP di kota, dan Rp 570.000 untuk SMP di kabupaten, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar (Depdiknas, 2009).

Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan amanat UUD 1945 perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-

jenis dana pendidikan, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2009.

Buku panduan BOS yang dikeluarkan Depdiknas (2009) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki lima kebijakan BOS tahun 2009. (1) Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi SD di kota Rp 400 ribu, SD di kabupaten Rp397 ribu, SMP di kota Rp575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp570 ribu. (2) Semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI. (3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. (4) Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberi sanksi pihak yang melanggar. (5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Bertolak dari kelima kebijakan tersebut, dapat dikatakan ada peningkatan biaya yang diberikan kepada siswa, dan keterlibatan Pemda untuk turut bertanggungjawab dalam keberhasilan BOS ini.

Hal penting dari lima kebijakan di atas adalah peningkatan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku. Kebijakan BOS di tahun 2009, besaran biaya yang diterima oleh setiap siswa disesuaikan pula dengan status daerah dengan ketentuan (1) SD/SDLB di kota: Rp 400.000,-/siswa/tahun; (2) SD/SDLB di kabupaten: Rp 397.000,-/siswa/tahun; (3) SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun; dan (4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten: Rp 570.000,-/siswa/tahun.

Sebagaimana tertuang dalam PP RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Jenis biaya pendidikan menurut Buku Panduan BOS Tahun 2009, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional (meliputi biaya personalia dan non-personalia), bantuan biaya pendidikan, beasiswa, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

dalam mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Program BOS yang dilaksanakan pada tahun 2009 ini merupakan program yang telah ditingkatkan biaya satuannya secara signifikan sehingga menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Adanya pembebasan biaya pendidikan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan bagi anak didiknya. Artinya biaya pendidikan yang saat ini telah gratis bukan lagi faktor penghambat dalam penyelesaian pendidikan dasar bagi masyarakat miskin.

Minat masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah untuk bersekolah setelah dikeluarkannya kebijakan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar semakin meningkat. Kebijakan pemerintah pusat pada program BOS Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang SMP. Hal yang mendasari terjadinya peningkatan minat tersebut karena pemerintah telah membebaskan semua biaya sekolah sehingga beban biaya pendidikan hingga jenjang SMP sudah menjadi tanggungjawab pemerintah, atau dengan kata lain pendidikan gratis.

Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif seseorang terhadap aspek-aspek lingkungan. Ada juga yang mengartikan minat sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. Meichati (1978), mengartikan minat adalah perhatian yang kuat, intensif dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Minat terdiri dari kognitif dan afektif. Aspek kognitif berupa konsep positif terhadap suatu objek dan berpusat pada manfaat dari objek tersebut. Aspek afektif nampak dalam rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi terhadap objek tersebut.

Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang SMP atau pendidikan dasar 9 tahun merupakan sebuah aspek yang positif, karena dibebaskannya biaya pendidikan yang selama ini menjadi beban yang cukup berat bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut disambut dengan senang oleh masyarakat. Artinya ada perhatian yang kuat, intensif dan menguasai masyarakat untuk mendorong

mendaftarkan anak-anaknya menjadi peserta didik pada jenjang SD hingga SMP.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program BOS terhadap peningkatan minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar secara gratis gratis pada Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan kondisi objektif tentang objek yang diteliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *survey on the spot*, dokumentasi, dan wawancara (Raharjo, 2003). *Survey on the spot* dilakukan dengan mendatangi lokasi sekolah untuk mengetahui secara langsung minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar di tujuh sekolah objek. Dokumentasi dilakukan melalui pemotretan untuk memberikan bukti adanya peserta didik yang mengikuti pendidikan gratis di sekolah yang disurvei. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada tiga kepala SD dan tiga kepala SMP dan tujuh orang tua peserta didik. Wawancara kepada kepala sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan jumlah peserta didik sebagai dampak dari kebijakan pembebasan biaya sekolah melalui dana BOS. Wawancara kepada orang tua peserta didik untuk mendapatkan informasi seberapa besar minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya dalam pendidikan dasar sebagai dampak dari kebijakan pembebasan biaya sekolah melalui dana BOS.

Selain menggunakan data primer di atas, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi laporan tahunan penyelenggaraan BOS dari tujuh SD dan tujuh SMP yang dijadikan objek penelitian tentang jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS pada periode 2008 dan 2009. Alasan digunakannya dua periode tersebut untuk mengetahui informasi terbaru tentang peningkatan jumlah peserta didik sesudah dikeluarkannya kebijakan pendidikan gratis melalui BOS pada tahun 2009.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap-tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, yaitu mereduksi (membuang) data yang dirasa tidak relevan untuk mendapatkan informasi tentang minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan setelah dikeluarkannya kebijakan pendidikan gratis melalui BOS tahun 2009, (3) penyajian data berupa

klasifikasi, penampilan, uraian, dan pembagian, dan (4) penyimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pemerintah pusat mengeluarkan lima poin utama dalam kebijakan BOS di tahun 2009, diantaranya, terdapat dua poin penting yaitu peningkatan secara signifikan biaya satuan BOS dan terlibatnya pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan BOS tahun 2009 melalui pengendalian, sosialisasi dan memenuhi kekurangan biaya operasional melalui APBD bila dana BOS tidak mencukupi.

Selain itu, dalam Buku Panduan BOS Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, (2) program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Walaupun tujuan utama program BOS untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Program BOS yang diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki perbedaan tujuan bila dibandingkan program BOS tahun-tahun sebelumnya. Semenjak diluncurkan program BOS pada Juli 2005, tujuan utama yang ingin dicapai adalah percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, sedangkan pada tahun 2009 ini, tujuan utamanya lebih ditekankan kepada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Artinya keberhasilan program BOS pada tahun-tahun sebelumnya mengalami perubahan orientasi dalam pemberian dana pendidikan bagi masyarakat miskin. Keberhasilan program BOS ditunjukkan pada angka partisipasi kasar (APK) di tingkat SMP, pada tahun 2008 mencapai 96,18%. Artinya, program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Program BOS tahun 2009 lebih menekankan pada, pendidikan dasar 9 tahun gratis, Setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena

tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara. Untuk itu, kepala sekolah perlu mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan maka diajak kembali ke bangku sekolah. Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan kepala sekolah dengan mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan melakukan program BOS tidak menutup kemungkinan peserta didik, orang tua, atau wali murid memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Tujuan utama program BOS Tahun 2009 adalah peningkatan mutu pendidikan dan memperluas keterlibatan masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SD hingga SMP. Pemerintah telah berupaya untuk membantu seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam mengurangi beban biaya pendidikan. Program BOS yang diperoleh dari hasil pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dialokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah dengan tujuan membebaskan peserta didik dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 (sembilan tahun). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada SD dan SMP. Kepedulian Pemerintah dalam meringankan biaya pendidikan sangat membantu masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Biaya sekolah dengan minat bersekolah bagi masyarakat miskin memiliki kaitan yang sangat erat, karena tingginya biaya sekolah telah menghambat minat masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SD dan SMP. Untuk itu Program BOS tahun 2009 ini aspek pembebasan biaya merupakan aspek yang paling utama agar minat secara kognitif dapat dirasakan bagi masyarakat miskin. Bersekolah bagi masyarakat miskin bukan lagi beban yang memberatkan melainkan menjadi kesenangan yang mendalam tanpa adanya beban yang memberatkan.

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan dana program BOS untuk 44 SMP, dan 163 SD. Penggunaan dana BOS di SD yang diteliti menunjukkan hasil 5 sekolah yang mengalami pening-

katan jumlah peserta didik, dan 2 sekolah yang mengalami pengurangan peserta didik. Sekolah yang mengalami pengurangan adalah SDN 3 Kurun mengalami pengurangan sebanyak 2 peserta didik, dan SDN 1 Tampang mengalami pengurangan sebanyak 6 peserta didik. Kelima sekolah lainnya mengalami peningkatan hingga mencapai 19 peserta didik pada SDN 2 Kurun.

Menurut Kepala SDN 2 Kurun, adanya pembebasan biaya sekolah yang telah diterima oleh sebagian besar masyarakat telah mendorong masyarakat untuk menyertakan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan gratis di sekolah tersebut. Informasi yang didapatkan orangtua melalui media televisi telah mendorong minat untuk mendaftarkan anak-anaknya mengikuti pendidikan gratis di sekolah. Berdasarkan kedua sumber tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis melalui BOS Tahun 2009 ini dapat meningkatkan minat masyarakat di Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan anaknya mengikuti sekolah gratis di daerah tersebut. Peningkatan sekolah penerima dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya melalui program BOS pada tahun 2009.

Perubahan yang terjadi kurang signifikan pada jenjang SMP. Terdapat satu sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik, yaitu SMPN 1 Kurun sebanyak enam peserta didik. Sebaliknya terdapat dua sekolah yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik, yaitu SMPN 4 Kurun sebanyak 6 peserta didik, dan SMPN 4 Tewah yang mengalami peningkatan sebanyak 38 peserta didik. Perubahan yang terjadi tidak merata, hanya SMPN 4 Tewah saja yang mengalami peningkatan paling besar, sedangkan empat sekolah lainnya tidak mengalami perubahan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMPN 4 Tewah menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS Tahun 2009 telah mendorong masyarakat di sekitar sekolah untuk menjadi peserta didik di SMPN 4 Tewah. Peningkatan persentasi sangat besar, yaitu meningkat mencapai 30 siswa pada tahun 2009. Demikian halnya hasil wawancara dengan orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut, kebijakan pendidikan gratis telah mendorong minat orang tua untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

Berbeda dengan SMPN 4 Tewah, SMPN 1 Kurun mengalami penurunan jumlah peserta didik mencapai 21 siswa, hal ini menurut informasi yang diberikan oleh Kepala SMPN 1 Kurun, pengurangan terjadi pada sekolah tersebut diakibatkan karena sekolah tersebut merupakan sekolah pilihan yang membatasi jumlah siswa dalam kelasnya, yaitu hanya

sebesar 30 peserta didik per kelas. Pada tahun 2009 jumlah peserta didik bukan mengalami pengurangan tetapi ada pembatasan siswa untuk mempertahankan kualitas. Namun sekolah ini merupakan sekolah yang dapat menampung peserta didik dalam jumlah besar dibandingkan enam sekolah lainnya.

Kepala SMPN 1 Kurun juga mengungkapkan bahwa informasi tentang pendidikan gratis telah sampai kepada semua orang tua peserta didik, sehingga informasi kebijakan pendidikan gratis telah mendorong mereka untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu orang tua peserta didik, bahwa kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS sangat sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMP di SMPN 1 Kurun. Namun sekolah ini tidak mengalami peningkatan jumlah peserta didik, karena adanya batasan jumlah penerimaan peserta didik.

Minat masyarakat pada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengikuti pendidikan gratis pada program BOS Tahun 2009 sangat tinggi. Hal ini terungkap pada hasil wawancara dengan Kepala SD dan SMP serta kepada para orang tua. Namun demikian, bila dilihat dari data perkembangan peserta didik pada jenjang SD dan SMP pada periode 2008 dan 2009, terlihat bahwa peningkatan jumlah peserta didik yang paling menonjol hanya pada jenjang SD. Sedangkan pada jenjang SMP perubahan peningkatan belum ditunjukkan secara signifikan, karena ada empat SMP yang tidak mengalami peningkatan jumlah peserta didik, dan satu SMP yang mengalami penurunan hingga enam peserta didik. Pada jenjang SMP, hanya ada dua sekolah yang mengalami peningkatan, yaitu SMPN 4 Kurun sebanyak enam peserta didik, dan SMPN 4 Tewah sebanyak 38 peserta didik. Artinya hanya satu sekolah saja yang mengalami peningkatan yang paling menonjol, yaitu SMPN 4 Tewah, sedangkan lainnya belum memberikan peningkatan yang signifikan.

Pembahasan

Esensi yang menjadi perhatian utama dalam pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang berkualitas dan biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini, indikator yang digunakan masih terbatas pada prestasi peserta didik. Padahal untuk mendapatkan peserta didik yang berprestasi, konsep pendidikan yang holistik perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah biaya yang terjangkau oleh masyarakat, sedangkan aspek lainnya adalah kualitas guru dan sekolah, hal ini seperti yang diung-

kapkan oleh Boediono & Ghozali (1999) yang mengungkapkan kualitas sekolah dan guru merupakan dua aspek sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia; dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut. Namun demikian, Indonesia masih belum berfikir ke arah kedua aspek tersebut, tetapi masih berusaha untuk menempatkan aspek biaya pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Tingginya biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh masyarakat bawah menjadi isu politis yang paling populer pada setiap pemilihan kepala daerah hingga kepala negara. Walaupun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan konsep pendidikan gratis pada negara yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan keragaman budaya masyarakat.

Pendidikan gratis seharusnya bukan sebuah isu politis, namun menjadi tanggungjawab pemerintah untuk merealisasikannya. UUD 1945 yang diamandemen telah menyatakan secara tegas pada Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya dipertegas pula pada ayat 4 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Siapapun pemimpin negara atau daerah, penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan tanggungjawab utama yang harus dijalankannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah pula menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya tertuang pada Pasal 34 ayat 2 pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pengertian pernyataan “tanpa memungut biaya” di atas, atau kata “gratis” pada program BOS Tahun 2009 telah membingungkan masyarakat. Kenyataannya, pendidikan gratis atau tanpa biaya belum dirasakan oleh masyarakat. Bila mengacu kepada tujuan program BOS yang tertuang pada Buku Panduan BOS Tahun 2009 dituliskan tiga tujuan utama BOS yaitu (1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri dan swasta; (2) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); dan (3) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menanggung biaya pendidikan masyarakat di tingkat dasar, namun hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tertuang pada ketiga tujuan utama BOS di atas. Dengan demikian pemerintah sudah tidak lagi menjalankan amanah pendidikan yang telah digariskan pada UUD 45 yang telah diamandemen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah seharusnya menanggung semua beban biaya pendidikan tingkat dasar. Masyarakat tidak lagi dibebani biaya apapun selama mereka mengikuti pendidikan dasar, baik pada jenis sekolah reguler (negeri atau swasta), sekolah rintisan bertaraf internasional maupun bertaraf internasional. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan gratis pada jenjang pendidikan dasar, selanjutnya masyarakat dibebaskan untuk memilih sekolah sesuai dengan kemampuan anak didiknya.

Sesuai dengan amanah undang-undang yang disampaikan di atas, maka makna pernyataan “tanpa memungut biaya” atau kata “gratis” pada program BOS Tahun 2009 akan menjadi jelas, yaitu pemerintah menjamin penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, tanpa memandang miskin atau kaya. Masyarakat tidak lagi dibebankan oleh berbagai macam biaya dengan dalih berbagai alasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan masyarakat pun berhak untuk memilih sekolah dengan standar kualitas yang terbaik atau dikenal dengan istilah sekolah rintisan bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional.

Survei minat masyarakat terhadap pendidikan gratis di Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu kasus kecil dari kasus lain yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Seperti yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa banyak persepsi yang ada dibenak masyarakat tentang kata “gratis” dalam pendidikan dasar sembilan tahun. Bagi masyarakat daerah seperti di Gunung Mas memaknai gratis adalah sekolah tanpa beban biaya sedikitpun. Hal tersebut telah terbukti di saat mereka melakukan pendaftaran hingga masuk sekolah tidak ada biaya apapun yang diminta oleh pihak sekolah. Namun demikian belum bisa dipastikan apakah memang benar-benar terjadi tidak ada biaya selama mengikuti sekolah tersebut, karena penelitian ini tidak melakukan survei setelah masa pendaftaran atau selama proses belajar mengajar. Secara sederhana penelitian ini telah mendapatkan informasi bahwa masyarakat daerah telah merespon pesan yang disampaikan pemerintah tentang pendidikan gratis.

Kembali kepada konsep minat yang telah disampaikan di awal, minat positif masyarakat untuk

menyekolahkan putera-puterinya telah mengubah dari sikap positif untuk bersekolah yang terbebani oleh biaya pendidikan menjadi sikap positif bersekolah yang disertai rasa senang karena terbebaskan oleh biaya pendidikan. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang merasakan kesenangan dalam menikmati sekolah tanpa beban biaya.

Faktor biaya merupakan salah faktor utama dalam mendorong minat masyarakat bersekolah pada jenjang pendidikan dasar. Besarnya biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat daerah akan berkurang bila beban biaya telah dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini ditanggung oleh pemerintah. Sehingga hilangnya faktor biaya yang telah membebani tersebut berdampak kepada sikap positif untuk mengikuti program pendidikan gratis.

Pemerintah harus memahami permasalahan kondisi keuangan masyarakat di Indonesia. Secara geografis banyak masyarakat yang berada di pelosok dan pulau terpencil memiliki masalah biaya hidup sehingga tidak memiliki minat bersekolah. Sesuai dengan amanah UUD 45 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan. Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan bebas biaya.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terkesan tingginya minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan gratis karena adanya Program BOS Gratis, namun penelitian ini belum meneliti sampai sejauh mana pendidikan gratis

tersebut. Jangan sampai terjadi tingginya minatas masyarakat tersebut menjadi susut di tengah jalan akibat pembebanan biaya pendidikan selama mengikuti proses belajar di tingkat SD maupun SMP. Dibeban masyarakat kata “gratis” adalah bebas biaya seluruhnya selama mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah berupa pendidikan gratis melalui program BOS yang diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki perbedaan tujuan bila dibandingkan program BOS tahun-tahun sebelumnya. Semenjak diluncurkan program BOS pada Juli 2005, tujuan utama yang ingin dicapai adalah percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, sedangkan pada tahun 2009 ini, tujuan utamanya lebih ditekankan kepada peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS telah mendorong minat masyarakat untuk berperan aktif mengikuti pendidikan dari jenjang SD hingga SMP. Hal ini ditunjukkan pada studi kasus yang dilakukan pada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagian besar masyarakat mengetahui adanya kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS yang terbaru di tahun 2009 ini, namun untuk jenjang pendidikan SD memiliki peningkatan jumlah peserta didik yang lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan SMP. Hal ini terlihat pada besarnya jumlah peningkatan peserta didik pada jenjang SD dibandingkan jenjang SMP.

DAFTAR RUJUKAN

- Boediono & Ghazali, A. 1999. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan: Pendekatan Fungsi Produksi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah KAJIAN*, 5 (20): 1-24
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Buku Panduan: Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.
- Koentjara. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Diktat Perkuliahan S2*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Meichati, S. 1978. *Motivasi Pembaca*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Raharjo, M.P. 2003. *Metode Riset Kualitatif*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), 2007. *ESCAP Population Data Sheet 2006*. (Online), (<http://www.unescap.org>, diakses tanggal 15 Januari 2010).